Pengantar:
Prof. Dr. Nurdin Laugu, S.Ag., S.S., M.A.

JEJAK SANG GURU

Bunga Rampai Kajian Ilmu Perpustakaan & Informasi

Pengantar:
Prof. Dr. Nurdin Laugu, S.Ag., S.S., M.A.

Jejak Sang GURU

Bunga Rampai Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi

IDEA press yogyakarta
Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN-978-623-484-011-7
9 786234 840117

adab press
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pengantar:
Prof. Dr. Nurdin Laugu, S.Ag., S.S., M.A.

JEJAK SANG GURU

Bunga Rampai Kajian Ilmu Perpustakaan & Informasi

IDEA press yogyakarta

adab press

JEJAK SANG GURU

Bunga Rampai Kajian Ilmu Perpustakaan & Informasi

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Thoriq Tri Prabowo dkk

JEJAK SANG GURU: Bunga Rampai Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi --Penyunting : Thoriq Tri Prabowo -- Cet Pertama- Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2022-- xii + 314 hlm --15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-484-011-7

1. Ilmu Perpustakaan - Bunga Rampai I. Prabowo, Thoriq Tri

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

JEJAK SANG GURU:
Bunga Rampai Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Penulis: Thoriq Tri Prabowo; Anis Masruri; Femi Nur Fitriyani; Nurdin Laugu; Khusnul Khotimah; Faisal Syarifudin; Marwiyah; Khansa' Syaridah; Anjini Sarofa; Ahmad Anwar; Khairunnisa Etika Sari; Sri Rohyanti Zulaikha; Dyah Nur Laili; M. Solihin Arianto; Utin Wahyuni Apriliyana; Djazim Rohmadi; Farah Bilqis Kansa; Arina Faila Saufa; Rima Nur Hidayati; Biaunal Agustia Yusti; Silvia Dwi Riyanti; Tafrikhuddin
Penyunting: Thoriq Tri Prabowo
Setting Layout: Nashi
Desain Cover: Ach. Mahfud
Cetakan Pertama: Juni 2022
Penerbit: Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh Adab Press
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan KalijagaYogyakarta

Bekerjasama dengan Penerbit IDEA Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright @2022 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk mengantarkan guru, kolega, dan teladan kami yang akan segera memasuki masa purnabakti

Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag.
Guru Besar Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Wujud perputaran waktu via detik, menit, jam, siang-malam, bulan-tahun, dasawarsa, abad, milenium, dan seterusnya merupakan salah satu basis regulasi fundamental bagi dinamika perkembangan manusia sepanjang perjalanan hidupnya. Sebagai basis regulasi, kerangka proses budaya bekerja mengitari pusaran perputaran waktu tersebut dan secara berkesinambungan, mekanisme proses budaya ini telah menghasilkan karya kemanusiaan yang bertakhta di atas stabilitas dan/atau instabilitas. Manusia mengalami perjalanan budaya berdasarkan derajat usaha dan takdirnya, yang berujung pada kenyataan realitas yang dicapai. Inilah perwujudan yang tak bisa dielakkan sebagai makhluk yang memang dihadirkan-Nya sebagai aktor yang bermain peran.

Salah satu potongan kecil dari episode dalam perjalanan menyusuri waktu dan permainan peran di atas, Sang Guru sekaligus Kolega telah berhasil melewati perjalanan itu. Beliau adalah Profesor Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag., sebagai perintis dan aktor enerjik awal, juga Ketua Program Studi pertama di Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya meyakini bahwa berkat keikhlasan dan pengabdiannya, Beliau berhasil membangun fondasi akademik yang kokoh bagi pertumbuhan dan perkembangan Program Studi tersebut. Sebagai akademisi yang profesional, tugas-tugas *leadership* dan bahkan administratif tidak membuatnya melalaikan karir akademiknya, sehingga bersamaan dengan itu Beliau juga berhasil meraih Jabatan

Fungsional Guru Besar, sebagai jabatan tertinggi dalam strata fungsional dosen.

Sebagai generasi akademisi penerus Beliau, para dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memahami dan menyadari pentingnya perjalanan tersebut, sehingga muncul lah kesepakatan besar untuk mengenangnya melalui penulisan buku ini. Keterlibatan sungguh-sungguh mereka dalam mengenang Beliau melalui Kado Publikasi Ilmiah, tidak hanya terbatas pada buku ini, tetapi juga secara bersamaan ikut berkontribusi di buku yang telah dikoordinir oleh fakultas. Buku yang disunting oleh Thoriq Tri Prabowo, M.IP. – dosen generasi ketiga kami – ini memuat dua tema besar, yaitu peranan Profesor Syihabuddin Qalyubi dalam pengembangan Pendidikan Program Studi Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan wacana bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi secara umum. Hadirnya buku ini di hadapan para pembaca adalah berkat kerja keras dan keikhlasan dari penyunting bersama penulis, karenanya ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada mereka semua dan semoga mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah SWT, *aamiin*.

Terakhir, atas nama Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, sekaligus Murid dari Profesor Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag., kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian profesionalnya yang berhasil dalam meletakkan batu pertama, fondasi kokoh akademik dan kelembagaan, Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, dan beragam lainnya berupa contoh akhlak, didikan, dan pelajaran, yang diberikan kepada kami. Selanjutnya, kami haturkan selamat kepada Beliau, yang telah berhasil maraih puncak pengabdiannya, berupa purna tugas, semoga berkah dan sehat selalu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 01 Juli 2022

Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirobil 'alamin.

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT. Berkat karunia-Nya, buku ini berhasil diselesaikan. Buku ini disusun sebagai tanda penghormatan kepada Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag yang akan segera memasuki masa purna tugas. Prof. Syihab, begitu kami para murid sekaligus kolega sering menyapa beliau. Kontribusinya pada pendidikan kepustakawanan nyata, terutama karena peranannya yang turut mengembangkan program studi D-3 Perpustakaan dan S-1 Ilmu Perpustakaan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahkan sejak statusnya masih institut (IAIN).

Seiring dengan bertambahnya usia, SDM dan lulusan dari Program Studi Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga juga senantiasa berkembang. Disadari atau tidak, kiprahnya dalam kepustakawanan Indonesia juga tidak dapat dimungkiri. Baik dalam tataran akademis maupun praktis, UIN Sunan Kalijaga turut memberikan warna dan corak kepustakawanan Indonesia. Buku yang ditulis oleh para dosen dan mahasiswa/alumni Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga ini barangkali ialah salah satu bentuk produk pengetahuan yang akan turut mewarnai diskusi kepustakawanan Indonesia atau bahkan global.

Buku yang sedang anda baca ini diberi judul **JEJAK SANG GURU**: Bunga Rampai Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Dipilihnya judul ini tidak lain karena buku merupakan jejak langkah guru kami, Prof. Syihab. Ia dan karena kontribusinya, kami,

para muridnya dapat menuliskan karya sederhana ini. Semoga jejak keilmuannya dapat menjadi pertanda untuk diikuti generasi selanjutnya. Juga agar para pembaca selalu ingat peran dan kontribusi dari Prof. Syihab, khususnya dalam pengembangan pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Buku ini terdiri beberapa artikel ilmiah dengan berbagai topik dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, mulai dari peranan perpustakaan di tengah masyarakat, peranan tokoh-tokoh kepustakawanan, kontribusi pustakawan dalam bidang pendidikan, dan topik yang bermuatan isu-isu kepustakawanan kontemporer lainnya. Artikel-artikel tersebut merupakan produk penelitian, mulai dari penelitian kepustakaan sampai dengan penelitian lapangan.

Segenap penulis mengucapkan terima kasih kepada para Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan segenap dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, karena atas dukungan dari program studi buku ini akhirnya dapat diterbitkan. Kami juga mengucapkan terima kasih pada banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini.

Semoga karya sederhana ini dapat mewarnai kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi dalam tataran nasional maupun global, sekaligus dapat menginspirasi lahirnya karya-karya lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Harapannya, ke depan muncul semakin banyak karya ilmiah bidang kepustakawanan yang dilahirkan oleh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebagaimana ungkapan populer, tiada gading yang tak retak. Buku ini tentu juga bukan merupakan sebuah karya yang sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran untuk keperluan perbaikan buku ini sangatlah diharapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Sleman, 01 Juli 2022

Penyunting

DAFTAR ISI

Halaman Persembahan v

Kata Sambutan vii

Kata Pengantar ix

Daftar Isi xi

Peranan Syihabuddin Qalyubi dalam Pengembangan Pendidikan Kepustakawanan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
▫ *Thoriq Tri Prabowo & Anis Masruri* 1

Pengembangan Perpustakaan Umum Ditinjau dari Perspektif Ruang Publik Jürgen Habermas
▫ *Femi Nur Fitriyani & Nurdin Laugu* 29

Peran Pustakawan dalam Memfasilitasi Pembelajaran Orang Dewasa Melalui Kegiatan Literasi Informasi
▫ *Anis Masruri & Khusnul Khotimah* 51

Tantangan Bagi Perempuan dalam Profesi Pustakawan
▫ *Faisal Syarifudin* 73

Perpustakaan dan Inclusivity: Implementasi Tujuan Nomor 10 Sustainable Development Goals (Sdgs), Reduced Inequality
▫ *Marwiyah* 93

Pemanfaatan Koleksi Literatur Kelabu Untuk Pemenuhan Kebutuhan Informasi Tugas Akhir Mahasiswa
▫ *Khansa' Syaridah & Thoriq Tri Prabowo* 127

Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Sicarik di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Menggunakan Eucs
▫ *Anjini Sarofa & Ahmad Anwar* 147

***Misleading* Konten Produk Kosmetik di Kalangan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
▫ *Khairunnisa Etika Sari* 171

Praktik Baik Implementasi Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial
▫ *Sri Rohyanti Zulaikha* 185

Evaluasi Kualitas Layanan dan Promosi Terhadap Jumlah Pengunjung di Perpustakaan SMA UII Yogyakarta
▫ *Dyah Nur Laili & M. Solihin Arianto* 211

Strategi Perpustakaan dalam Konsep Layanan Sirkulasi di Grhatama Pustaka DPAD DIY Pada Era *New Normal*
▫ *Utin Wahyuni Apriliyana & Djazim Rohmadi* 229

Analisis Perubahan Layanan Perpustakaan di Era New Normal
▫ *Farah Bilqis Kansa, Arina Faila Saufa, Rima Nur Hidayati, & Biaunal Agustia Yusti* 257

Analisis Infopreneurship Nonprofit Pada Layanan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
▫ *Silvia Dwi Riyanti & Tafrikhuddin* 269

Tentang Penulis 301

PERPUSTAKAAN DAN INCLUSIVITY: IMPLEMENTASI TUJUAN NOMOR 10 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS), REDUCED INEQUALITY

Marwiyah
Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: *marwiyah.mlis@uin-suka.ac.id*

Cara mengutip:

Marwiyah. (2022). Perpustakaan dan Inclusivity: Implementasi Tujuan Nomor 10 Sustainable Development Goals (SDGs), Reduced Inequality. In *Jejak Sang Guru: Bunga Rampai Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi* (pp. 93–126). Idea Press Yogyakarta. https://ip.uin-suka.ac.id

Abstract

Library is one of public institutions that promote inclusive values through library services provided for all types of users regardless nationality, gender, religion, race, language, social and economic status as clearly stated in IFLA/UNESCO Public Library Manifesto. Furthermore, public libraries have responsibility to give special services for people who cannot access regular services such hospitalized people, older people, people in jail and people with disabilities. This is in line with UN's sustainable development goals (SDGs) that promote inclusivity for community development formulated in 17 goals with its iconic statement, "leaving no one behind." Based on the function of library as social space that offer inclusive values for its users, this paper explores the role of libraries in implementing SDG number 10, reduced inequality, through library services and programs to involve all users in order to reduce inequality. Using relevant literatures related to this research topic

with main focus on inclusivity, library and SDGs as main data, this research shows that library has leading roles to reduce inequality through library programs: 1) developing guidelines for managing library service for specific types of users (poor/ homeless people, people with disabilities, older people/ dementia, immigrants, multicultural society, etc.) published by IFLA. 2). Implementation of the guideline in various type of library (national, public and academic library). 3) providing social inclusion programs through library services and programs that involve community to participate in those programs with the purpose to promote social equality and community development.

Keywords*: Inclusive Library, SDGs, Reduced Inequality, Social Inclusion*

Abstrak

Perpustakaan merupakan lembaga yang menawarkan nilai-nilai inklusif dengan memberikan layanan kepada seluruh masyarakat pengguna tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa dan status social sebagaimana dinyatakan dalam IFLA/UNESCO Public Library Manifesto. Bahkan lebih lanjut dinyatakan bahwa perpustakaan juga harus menyediakan layanan untuk masyarakat yang tidak mengakses perpustakaan dengan cara yang normal seperti orang yang sedang sakit dan narapidana. Secara implisit dapat dilihat bahwa perpustakaan berpotensi untuk mewujudkan prinsip inklusif dengan prisip SDGs yang dicanangkan oleh PBB yaitu leaving noone behind. Dengan melihat fungsi perpustakaan yang inklusif ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali peran perpustakaan dalam mengimplementasikan tujuan SDGs 10 yaitu reduced inequality yang merupakan gerakan untuk mengurangi ketimpangan social melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung inklusif. Metode yang dalam penelitian ini digunakan adalah studi pustaka yaitu dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan dengan topic penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan social (reduced inequality) melalui beberapa upaya yaitu: 1) pengembangan panduan/pedoman layanan untuk berbagai jenis pengguna perpustakaan yang diterbitkan oleh IFLA seperti penyandang disabilitas, masyarakat tidak mampu (homeless), masyarakat multicultural, imigran, masyarakat lansia dengan dementia, dan juga pengguna dengan dyslexia 2) penerapan standar yang

diterbitkan IFLA tersebut di berbagai jenis perpustakaan 3) mengambangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan melibatkan semua masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mendukung (promote) kesetaraan social dan mengurangi kesenjangan, yang dilakukan oleh perpustakaan di berbagai Negara di berbagai benua.

Kata Kunci: *Perpustakaan Inklusif, SDGs, Reduced Inequality, Inklusi Sosial*

A. Pendahuluan

Kebebasan, kesejahteraan masyarakat dan pengembangan masyarakat merupakan nilai dasar kemanusiaan yang hanya akan bisa terwujud melalui kemampuan masyarakat yang memiliki pengatahuan yang baik untuk mengimplementasikan hak-hak demokrasi mereka dan mampu berperan aktif dalam masyarakat (UNESCO/IFLA Manifesto Public Library). Akan tetapi berkembangnya masyarakat industry menggiring pada terjadinya gap antara masyarakat miskin dan kaya, sehingga tidak semua masyarakat bisa memperoleh fundamental human values tersebut. Oleh karena organisasi-organisasi Internasional berusaha untuk mengurangi kesenjangan tersebut dengan berbagai upaya, salah satunya adalah PBB yang mencanangkan Millennium Development Goal (MDG) yang berusaha untuk memberantas kemiskinan. Dan setelah selesai dengan MDG, maka PBB memperluas lagi goal-nya dengan berbagi tujuannya melalui Sustaiable Development Goals (SDGs). SDGs yang lahir pada tahun 2016 merupakan hasil dari Konferensi PBB tentang sustainable Development di Rio Janeiro pada tahun 2012 dengan tujuan untuk menghasilkan serangkaian tujuan untuk menjawab tantangan yang tengah dihadapi oleh dunia saat ini yang berkaitan dengan masalah lingkungan, politik dan ekonomi (https://www.africa.undp.org). Dalam SDGs terdapat 17 tujuan dengan 169 target. 17 tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet dan memastikan kemamkmuran bagi seluruh umat manusis (United Nations, 2015, para. 1). Meningkatnya ketimpangan, social exclusion dan ancaman massif terhadap lingkungan menjadi ancaman bagi sustainable development. Oleh karena itu, SDGs juga merupakan

panggilan penting untuk mengubah dunia menjadi jalur yang lebih berkelanjutan, jalur di mana kemakmuran menjadi milik bersama, terciptanya masyarakat yang inklusif dan lingkungan yang tetap terjaga (Ghorbani, 2020). Prinsip utama dari SDGs adalah *leaving no one behind* (tidak meninggalkan satu orang pun) yang menuntut adanya prinsip keadilan yaitu keadilan procedural, sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini belum terlibat dalam proses pembangunan dan keadilan substansial yaitu bagaiman kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan warga yang tertinggal (https://www.sdgs2030indonesia.org/). Untuk implemnetasi prinsip utama ini maka terdapat 2 tujuan yang penting yang dikembangkan dalam SDGs ini yaitu tujuan nomor 5 tentang kesetaraan gender dan tujuan 10 yaitu mengurangi ketimpangan yang dalam pelaksanaannya kemudian menjadi pendukung 15 tujuan SDGs lainnya.

Dalam mencapai tujuan SDGs diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah dengan pihak swasta, penduduk dan warga masyarakat. Perpustakaan merupakan salah satu lembaga yang berpotensi untuk mengimplementasikan program untuk mencapai SDGs karena perpustakaan, terutama perpustakaan umum, mempunyai banyak fungsi dalam mendukung program-program UNESCO sebagaimana dinyatakan oleh Edward Sydney, president of the Library Association in the United Kingdom yang dinyatakan dalam UNESCO Bulletin for Libraries tahun 1956 bahwa UNESCO telah memberikan pengaruh dan mendorong hampir semua perpustakaan umum di dunia (Laugesen, 2014 p. 1). Hal ini juga didukung oleh Presiden IFLA Glòria Pérez-Salmeron yang menyatakan bahwa perpustakaan dapat menjadi gerbang utama akses informasi yang bisa menjadi sarana untuk bisa mencapai perubahan social yang sebenarnya, di mana masyarakat bisa terhubung dengan akses informasi yang berguna untuk memperbaiki kehidupan masyarakat (Cofa, 2019, p. 142). Perpustakan umum sebagai lembaga yang memiliki tujuan yang linear dengan tujuan SDGs seperti gender equality, reducing inequality dan goal nomor 4. Hal ini jelas dinyatakan dalam Manifesto Perpustakaan umum yang menyatakan bahwa perpustakaan adalah pusat informasi

di tingkat local yang menyediakan berbagai pengetahuan dan informasi untk pengguna perpustakaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa layanan perpustakaan umum disediakan untuk masyarakat berdasarkan pada azas keseimbangan akses untuk semua tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa dan status social (IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994). Manifesto ini juga menjelaskan bahwa perpustakaan harus menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan pengguna perpustakaan segala usia. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa perpustakaan memiliki misi untuk membentuk masyarakat inklusif di mana masyarakat memiliki hak sama dalam menerima layanan perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan memiliki peran dalam mengimplementasikan tujuan nomor 10 dari SDGs yaitu mengurangi ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat (Reduce inequality). Ketimpangan dipandang sebagai problem social yang paling mendesak (Kaltenborn, Krajewski dan Kuhn, 2020 hal, 138), karena ketimpangan ini besifat multidisiplin yaitu menyangkut diemnsi social, ekonomi dan ekologi (poverty4). Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana perpustakaan mewujudkan konsep inklusif dan upaya mengurangi ketimpangan melalui kebijakan dan tindakan. Dan makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perpustakaan sebagai upaya untuk mendukung *Sustainable Development Goals*, tujuan nomor 10 yaitu mengurangi ketimpangan (reduce inequality) baik melalui kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh perpustakaan.

B. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Beberapa penelitian tentang perpustakan dan SDGs sudah dilakukan dengan focus yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Balôck (2019) yang berjudul *Public libraries and goal 16 of the* SDGs *in Cameroon: which actors for a national policy?* Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana perpustakaan umum di Kamerun berkontribusi dalam mencapai tujuan SDGs no 16 yang berkaitan dengan "peace, justice and strong institutions." Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dengan pustakawan perpustakaan umum dari beberapa

wilayah yang berbeda, Ministry of Arts and Culture sebagai otoritas yang bertanggungjawab dalam SDGs dan statistik dari National Institute of Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perpustakaan umum dalam implementasi SDGs goal nomor 16, meskipun mereka mengalami hambatan yang berkaitan dengan budget dan sebagian bergantung pada donasi. Akan tetapi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang meluas dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu menjadi pengimbang dari kekurangan dana tersebut. Demokrasi, hidup berdampingan, akses pekerjaan dan wirausaha melalaui penyebaran informasi dan animasi merupakan alat yang efektif yang diimplementasikan oleh perpustakaan umum. Perpustakaan umum juga kadang terlibat sebagai mediator dalam resolusi beberapa konflik.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yap (2019) dengan judul *Toward becoming an inclusive library Integrating Sustainable Development Goal 5 in the library agenda*. Penelitian ini mengungkap peran perpustakaan dalam mengintegrasikan SDGs dalam tugas perpustakaan dan bagaimana perpustakaan dapat secara positif mengadvokasi untuk perubahan dalam mencapai masyarakat yang inklusif, terbuka dan toleran. Penelitian ini adalah penelitian survey dan evaluasi program yang didesain untuk mengumpulkan pendapat dari partisipan dari dua program perpustakaan yang menekankan pada kesetaraan gender (gender equality) di Universitas Nazarbayev. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan Qualtrics. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan yakin bahwa program perpustakaan yang berkaitan dengan gender merupakan cara positif untuk menstimulasi masyarakat dengan keseimbangan gender. Program kegiatan perpustakaan tersebut mampu meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat akademis dan mempromosikan kesejahteraan dan hak-hak dari sector yang terpinggirkan. Dan yang terakhir, program-program tersebut menjawab berbagai stigma dan oleh karena itu memperkuat kelompok yang rentan terhadap diskriminasi.

Penelitian ketiga *adalah Leaving no-one behind? Social inequalities and contrasting development impacts in rural Rwanda*

dilakukan oleh Dawson (2018). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan kondisi Rwanda pasca genocide yang berpengaruh pada perkembangan ekonomi di Ruwanda. Penelitian bertujuan menemukan perspektif masyarakat pedesaan Ruwanda terhadap perubahan yang mempengaruhi mereka. Metode yag digunakan adalah pendekatan multidimensional wellbeing yang diterapkan melalui metode penelitian campuran yang melibatkan 115 115 rumahtangga di dua lokasi di Ruwanda bagian Barat dari tahun 2011-2012. Hasilnya adalah bahwa tingkat household level dipengaruhi oleh kekuatan social ekonomi dan kelompok social etnis. Dampak negative yang dirasakan olah masyarakat paling miskin adalah pembatasan kebebasan, kehilangan bahan dan sumber-sumber kultural. Hasil penelitian memberikan masukan perlunya dukungan program proteksi social terutama yang menargetkan masyarakat yang tidak memiliki lahan, masyarakat yang rapuh dan secara kultural adalah minoritas. Oleh karena itu diperlukan perubahan strategi yang dramatik untuk menerapkan "leave no one behind" dan menghindari semakin berkembangnya kemiskinan dan kondisi yang lebih buruk dari ketimpangan.

Dengan memperhatikan pentingnya peran perpustakaan dalam mendukung SDGs seperti yang dipaparkan dalam penelitian pertama dan kedua yaitu dalam mencapai perdamaian dan keadilan (Goal nomor 16) dan penelitian kedua yang memaparkan peran perpustakaan dalam mendukung SDGs goal nomor 9 yaitu kesetaraan gender dengan melalui kegiatan-kegiatan perpustakaan. Perpustakaan pastinya juga dapat mendukung dalam mewujudkan goal nomor 10 yaitu mengurangi ketidakseimbangan yang kemudian akan menjadi focus dari makalah ini.

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs atau dikenal juga dengan global goals merupakan panggilan untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi planet dan memastikan masyarakat menikmati kedamaian dan kesejahteraan (Ghorbani, 2020). SDGs dengan 17 tujuan yang ditetapkan merupakan kelanjutan dari Millennium Development

Goals (MDG) menekankan upaya mengurangi kemiskinan. Keberhasilan MDG yang ditandai dengan berkurangnya angka kemiskinan di beberapa Negara anggota PBB menjadi dasar untuk mengembangkan SDGs dengan menambahkan area yang dijadikan sebagai sasaran SDGs seperti *climate change, economic inequality, innovation, sustainable consumption, peace and justice*, di antar priorotas-prioritas yang lainnya. SDGs juga dikembangkan melalui proses yang panjang dengan melibatkan Negara-negara anggota PBB yang diawali dengan 300 tujuan yang diajukan dan selama 3 tahun didiskusikan, diperdebatkan dan akhirnya pada pertengahan 2015 disepakati 17 tujuan yang menjadi agenda yang akan dilaksanakan dari 2015-2030 (Ghorbani, 2020). Agenda SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global disahkan secara resmi oleh para pemimpin dunia pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB. Adapun 17 tujuan tersebut adalah: 1) No poverty 2) No Hunger 3) Good health 4) Quality education 5) Gender equality 6) Clean water and sanitation 7) Renewable energy 8) Good jobs and economic growth 9) Innovation and infrastructure 10) Reduced inequality 11) Sustainable cities and communities 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab 13) Climate action 14) Life below water 15) Life on land 16) Peace and justice 17 Partnership for the goals.

Setiap negara anggota PBB memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan agenda 2030 ini. Di Indonesia pelaksanaan SDGs ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Yang dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

2. Sustainable Development Goal No. 10 Reduce Inequality

Inequality sebagai tujuan dari SDGs merupakan salah satu isu yang banyak diperdebatkan dalam proses penyusunan SDGs yang akarnya terletak pada kritik terhadap Millenium Development Goal (MDG) yang secara historis merupakan komitmen UNCED yang pada

perkembangan menjadikan inequality sebagai tantangan global untuk menjawab akar penyebab inequality termasuk inequality antar Negara maupun dalam institusi global (Fukuda-Parr, 2019). Dan cara terbaik untuk melawan inequality adalah dengan mengembangkan norma politik yang baik dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat (Fukuda-Parr, 2019). Equality adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan artinya inequality adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Inequality menjadi tema inti dari SDGs karena inequality bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan SDGs. Berdasarkan analisa terhadap evidence, data and examples dari berapa Negara di Asia maka ditemukan hubungan antara inequality dan pencapaian SDGs (unescap.org) misalnya saja berkaitan dengan goal nomor 1 yaitu *ending poverty in all its forms everywhere*. Hal ini ditunjukkan dengan data yang menyatakan bahwa sejumlah penelitian menyarankan semua Negara yang memiliki ketimpangan income yang tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Goal nomor 2 yaitu *ending hunger, achieving food security and improved nutrition and sustainable agriculture* juga berkaitan dengan dengan inequality atau ketimpangan. (Mengurangi kelaparan). Ketimpangan dalam mendapatkan nutrisi yang baik dapat menciptakan keuntungan dan kerugian pada anak-anak dan menciptakan lingkaran kemiskinan dan eksklusif antar generasi. Berdasarkan data yang diperoleh, negara dengan inequality dalam pendidikan dari ibu rumah tangga mempengaruhi tingkat stunting di area tersebut. Inequality memiliki empat sisi yaitu akses, gender, opportunity and outcomes (United Nations, 2015). Dan dari sini, maka akses terhadap sumber-sumber informasi merupakan area perpustakaan sehingga bisa dikatakan bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam mengurangi inequality yang dalam hal ini sebagai bagian dari tujuan SDGs yang dicanangkan oleh PBB.

3. Perpustakaan Umum dan Inklusif

Perpustakaan umum memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat demokratis dengan menyediakan akses ke beragam pengetahuan, ide dan pendapat dengan tujuan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna baik sebagai individu maupun kelompok untuk kepentingan pendidikan, informasi dan pengembangan diri termasuk untuk rekreasi dan hiburan (Henry, 2001 hal. 2). Dalam Public Library IFLA/UNESCO Public Library Manifesto dengan jelas dinyatakan bahwa perpustakaan umum merupakan pusat informasi di tingkat local yang menyediakan berbagai pengetahuan dan informasi untuk pengguna perpustakaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa layanan perpustakaan umum disediakan untuk masyarakat berdasarkan pada azas keseimbangan akses untuk semua tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa dan status social (IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994). Perpustakaan umum juga harus menyediakan layanan khusus untuk masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan regular perpustakaan karena berbagai alasan seperti masyarakat minoritas, difabel atau orang yang sedang dirawat di rumah sakit atau di penjara. Meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan kelompok masyarakat tersebut membutuhkan layanan informasi. Manifesto ini juga menjelaskan bahwa perpustakaan harus menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan pengguna perpustakaan segala usia.

Hal ini juga menunjukkan bahwa perpustakaan umum sejak didirikan sudah menawarkan kesetaraan untuk masyarakat penggunanya. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa perpustakaan memiliki misi untuk membentuk masyarakat inklusif di mana masyarakat memiliki hak sama dalam menerima layanan perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan memiliki peran dalam mengimplementasikan beberapa goal yang berkaitan dengan promosi kesetaraan untuk mewujudkan masyarakat inklusif seperti goal nomor 4 yang focus pada quality education di mana semua warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan, goal nomor 5 yang promote kesetraan gender dan goal nomor 10 dari SDGs yaitu mengurangi ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Perpustakaan, melalui oraganisasi seperti IFLA menanggapi agenda SDGs ini dengan pembahasan tentang Post-2015 development agenda dalam konferensi IFLA yang diadakan pada tahun 2015 di Capetown Afrika Selatan dan ini merupakan kontribusi dan misi layanan

perpustakaan dan informasi untuk sustainable development atau pembangunan berkelanjutan (Igbinovia, 2016 hal. 16).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada interpretasi terhadap fenomena dalam setting alami dengan tujuan untuk menemukan makna dari setting tersebut (Denzin and Lincoln, 2009). Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka yaitu dengan menggunakan tulisan-tulisan yang terkait dengan tema penelitian ini yang mencakup peran perpustakaan dalam pengembangan masyarakat, sustainability development goals terutama goal nomor 10 yaitu reduced inequality.

D. Pembahasan

Perpustakaan mempunyai peran penting dalam mewujudkan agenda SDGs. Perpustakaan di seluruh dunia, terutama perpustakaan umum berupaya untuk melakukan gerakan mendukung SDGs dengan mengembangkan peran-peran baru mereka yang tentu saja membutuhkan konsolidasi layanan mereka yang membantu implementasi SDGs (Igbinovia, 2016 hal 16). Dalam sejarah pengembangan perpustakaan, bisa dilihat bahwa ide munculnya perpustakaan umum sudah ditegaskan dalam Manifesto UNESCO Public Library yang diterbitkan tahun 1949 dan ditulis oleh seorang penulis dan ilmuwan Perancis bernama André Maurois (Laugesen, 2014, hal 3).

Dalam manifesto tersebut UNESCO percaya bahwa perpustakaan umum adalah kekuatan yang hidup untuk mendukung pendidikan umum dan untuk pertumbuhan pemahaman secara internasional untuk mempromosikan perdamaian. Selain itu, perpustakaan juga dipandang sebagai produk demokrasi modern dan sebagai demonstrasi praktis dari keyakinan akan demokrasi dalam pendidikan universal sebagai proses sepanjang hayat dan oleh karena itu perpustakaan harus terbuka untuk semua orang tanpa memandang pekerjaan, kredo, kelas dan ras (Laugesen, 2014, hal 3). Dan ini sejalan dengan manifesto public library yang menyatakan

bahwa perpustakaan umum memberikan layanan dengan dasar kesetaraan akses untuk semua tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, bahasa dan status social (IFLA/UNESCO Public Library Manifesto, 1994). Oleh karena itu perpustakaan umum harus menyediakan layanan untuk semua jenis pemustaka, termasuk yang tidak bisa mengakses layanan secara regular seperti kelompok minoritas, penyandang disabilitas pasien di rumah sakit dan juga nara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan memang lembaga yang inklusif yang berupaya menghilangkan kesenjangan masyarakat dan ini sesuai dengan tujuan SDGs nomor 10 yaitu reduce inequality yang dalam hal ini dikaitkan dengan peran perpustakaan sebagai social spaces, tempat yang menyediakan berbagai sumber informasi untuk mendukung pembelajaran masyarakat dan pengembangan diri sehingga bisa menciptakan masyarakat yang demokratis dan damai. Untuk mendukung prinsip ini, maka IFLA bersama dengan UNESCO sebagai organisasi internasional, mengembangkan standar layanan perpustakaan untuk berbagai jenis masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Selain itu, banyak perpustakaan yang sudah menerapkan layanan perpustakaan dengan berdasarkan pada pedoman ini, bahkan mengembangkan layanan untuk mendukung inklusi sosial.

1. Pengembangan pedoman/manual layanan perpustakaan untuk kelompok masyarakat tertentu

IFLA sampai saat ini sudah menerbitkan beberapa pedoman layanan perpustakaan untuk kategori masyarakat pengguna perpustakaan, terutama masyarakat yang kurang beruntung seperti masyarakat penyandang disabilitas, lansia, masyarakat kurang mampu, narapidana dan masyarakat multicultural.

a. Pedoman layanan perpustakaan untuk tuna wisma (homeless)

Masyarakat miskin merupakan golongan masyarakat yang rentan untuk tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga masyarakat karena tidak memiliki tempat tinggal yang tetap sehingga sulit untuk dipantau dan dilibatkan dalam kegiatan social masyarakat. Untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dan tuna wisma

mendapatkan layanan masyarakat maka IFLA menerbitkan pedoman layanan masyarakat untuk masyarakat tuna wisma. Pengembangan pedoman ini diawali pada pertemuan Satelite Meeting di Estonia pada tahun 2012 dengan tema *The Homeless and the Libraries - The Right to Information and Knowledge for All*. Pertemuan ini diorganisir oleh *IFLA Section for Library Services to People with Special Needs (LSN)*. Pada tahun berikutnya pada pertemuan di Copenhagen 2013, misi LSN diperluas dengan memperluas misinya yaitu dengan memasukkan *people experiencing homelessness* yang kemudian dilanjutkan dengan menetapkan batasan atau definisi tuna wisma (*homeless person)*. Dan pada tahun berikutnya, mulai diadakan projek pengembangan pedoman layanan perpustakaan untuk *people experiencing homelessness* yang dicetuskan pada pertemuan di Cebu, Filipina pada tahun 2014. Upaya pengembangan pedoman ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan mengundang berbagai Negara untuk sharing pengalaman melayani maysarakat homeless yang akan dijadikan bahan untuk pengembangan pedoman tersebut. Pada bulan Februari 2016, IFLA's Professional Committee memberikan respon terhadap program pedoman tersebut dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Dan pada tahun 2017 buku pedoman layanan perpustakaan untuk tuna wisma diterbitkan IFLA (IFLA Library Services to People with Special Needs, 2017).

Dalam pedoman ini dijelaskan batasan homeless yang mencakup 3 kriteria yaitu: *People without accommodation* (gelandangan yang tidur di jalanan atau fasilitas umum lainnya), *People living in temporary or crisis accommodation* (pengungsi, imigran, dll.) dan people *living in severely inadequate and/or insecure accommodation* (misal; People sharing with friends and relatives on a temporary basis, People living under threat of violence). Kondisi homeless ini memberikan dampak pada berbagai kehidupan sehari-hari seperti masalah kesehatan, social relation dan inequality. Dalam pedoman ini jelas dinyatakan bahwa inequality merupakan hal penting yang terjadi dalam masyarakat miskin yang dalam hal ini adalah tuna wisma di mana golongan masyarakat ini mengalami ketimpangan dalam mengakses layanan dan juga hak-hak mereka.

Penelitian terhadap beragam layanan di masyarakat menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menyediakan akses tempat tinggal, pekerjaan, jaminan kesehatan, pendidikan dan hak sipil dan kebutuhan dasar lainnya seperti pangan dan sandang (IFLA: 2017, hal. 29), yang sebenarnya merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Kondisi miskin menyebabkan terjadinya tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perpustakaan memiliki peran penting dalam pemenuhan hak asasi tersebut di mana perpustakaan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan hak atas informasi dan berpartisipasi dalam cultural life (IFLA: 2017, hal. 30). Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) ayat 19 dijelaskan bahwa kebebasan untuk mencari, menerima dan mengkomunikasikan informasi dan ide sebagai bagian dari hak atas kebebasan berekspresi. Akses informasi juga vital bagi implementasi hak atas kehidupan ekonomi, social dan budaya termasuk hak tas pendidikan, kerja, kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Tanpa akses informasi, masyarakat bisa mengalami homelessness atau kesempatan untuk belajar tentang program pendidikan, tawaran kerja, layanan kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu perpustakaan memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan (inequality) ini dengan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Dari berbagai Negara yang memberikan layanan untuk homeless maka dapat dilihat bahwa perpustakaan memiliki komitmen dalam memberikan layani pada masyarakat miskin ini melalui layanan yang terbagi dalam 5 kategori yaitu (IFLA: 2017, hal 41):

1. Akses dasar layanan perpustakaan yang mencakup kegiatan menyediakan akses ke perpustakaan, koleksi dan layanan yang seimbang untuk seluruh anggota masyarakat termasuk tuna wisma.
2. Mendorong untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan homeless maka perpustakaan perlu mendesain kegiatan yang mendorong mereka untuk memiliki gaya hidup yang lebih stabil, misalnya saja seperti yang dilakukan oleh Perpustakaan Kota Zagreb (Zagreb city library) yang memiliki tujuan untuk memperkuat tuna wisma

dengan menyediakan pengetahuan dan ketrampilan yag dibutuhkan untuk menjadi inklusif aktif dalam kehidupan social dan budaya dan dalam lapangan kerja.

3. Persiapan dan bantuan dalam mendapatkan pekerjaan. Beberapa perpustakaan menyediakan kegiatan yang berhubungan dengan menyiapkan tuna wisma untuk mencari pekerjaan dengan memberikan memberikan layanan seperti: akses computer dan pelatihan cara menggunakan computer, mengisi form aplikasi, membantu menyiapkan resume, membuat akun email dan latihan cara menggunakan email, konseling dan praktek wawancara.
4. Layanan pendidikan dan menyediakan sumber-sumber koleksi perpustakaan, kesempatan belajar adalah salah satu layanan yang disediakan oleh perpustakaan dalam bentuk kegiatan training/ pelatihan, kelas bahasa internasional; (terutama untuk imigran dan pengungsi), literasi dasar untuk masyarakat local atau penduduk asli. Salah satu contoh layanan ini adalah yang dilakukan oleh Kirklees library di Inggris yang menawarkan kegiatan adult literacy program selama 6 minggu.
5. Memenuhi kebutuhan social. Layanan untuk masyarakat tuna wisma pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan social seperti menghubungkan tuna wisma dengan layanan social seperti tempat tinggal, layanan kesehatan dan mendapatkan pekerjaan.

b. Pedoman layanan perpustakaan untuk masyarakat difabel

Pengguna difabel adalah salah satu potential user yang harus diberikan layanan perpustakaan karena sebagaimana pengguna non difabel, masyarakat difabel pun mempunyai hak untuk mengakses layanan dan koleksi perpustakaan. Oleh karena itu, IFLA mengembangkan pedoman layanan untuk difabel berupa checklist yang diterbitkan pada tahun 2005 yang berjudul *Access to libraries for persons with disabilities – Checklist*. Checklist ini dikembangkan oleh *IFLA Standing Committee of Libraries Serving Disadvantaged Persons* (LSDP) dengan tujuan dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi kondisi perpustakaan yang ada dalam kaitannya dengan aksesibilitas

bangunan, layanan, bahan pustaka dan program perpustakaan dan untuk meningkatkan aksesibilitas jika memang diperlukan (Irvall and Nielase, 2005, hal 3). Dengan berkembangnya teknologi maka saat ini sedang disiapkan edisi baru yang masih dalam tahap revisi. Secara garis besar. checklist ini terdiri dari 3 aspek utama yang harus dipenuhi perpustakaan untuk melayani semua jenis disabilitas yaitu:

1) Akses fisik

Aspek akses fisik mencakup aksesibilitas lingkungan di luar gedung dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ketersediaan symbol untuk menunjukkan tempat untuk difabel, sarana yang memudahkan difabel untuk menuju perpustakaan seperti tersedianya ramp dan rail. Kemudian untuk jalan masuk perpustakaan yang ramah dan aman untuk semua jenis difabel dengan desain yang aksesibel untuk semua jenis difabel misalnya adanya ramp untuk difabel fisik, jalan yang bebas halangan untuk tuna netra. Selanjutnya adalah akses menuju koleksi dan layanan di mana desain ruang dan rak harus disesuaikan dengan pemustaka difabel seperti ukuran rak yang bisa dijangkau, jarak antar rak buku yang cukup untuk pengguna kursi roda, dan ketersediaan toilet khusus untuk difabel. Selain itu, perpustakaan seharusnya memiliki satu seksi layanan khusus untuk difabel yang menyediakan layanan dan koleksi khusus untuk difabel.

2) Media format

Perpustakaan harus menyediakan semua koleksi yang bisa diakses oleh pemustaka difabel dalam format yang sesuai dengan jenis disabilitas seperti buku braille dan audio books untuk pemustaka tuna netra. Pustakawan juga harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapat koleksi untuk difabel ini. Komputer juga salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menyediakan layanan kepada pemustaka difabel sehingga lebih aksesibel dan ramah difabel, misalnya saja ketersediaan fasilitas pendukung seperti computer yang adaptif untuk pemustaka tuna netra.

3) Layanan dan komunikasi

Menurut checklist IFLA ini, perpustakaan harus menyediakan layanan ramah difabel yang mencakup pelaksanaan layanan dan program kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kelompok pemustaka difabel (Irvill & Nielsen, 2005, hal 11). Oleh karena itu pustakawan harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemustaka difabel sehingga pemustaka ini merasa diterima sebagai bagian dari komunitas masyarakat dan nyaman untuk mengakses perpustakaan. Pustakawan harus memahami bahwa pemustaka difabel harus berhadapan tidak hanya dengan hambatan fisik tetapi juga hambatan psikologis untuk berkunjung ke perpustakaan dan menyampaikan kebutuhan informasi mereka. Untuk membekali pustakawan dalam memberikan layanan untuk pemustaka difabel maka pustakawan perlu diberikan pelatihan bagaimana membantu difabel dan oleh karena itu memahami jenis-jenis disabilitas sangat penting bagi pustakawan supaya dapat menjalin komunikasi dengan baik dan memberikan bantuan yang sesuai dengan jenis disabilitas yang disandang pemustaka. Komunikasi tidak terbatas pada komunikasi in person, tetapi juga komunikasi dalam media elektronik, misalnya melalui media social dan internet karena pustakawan juga harus membagikan informasi melalui halaman web perpustakaan. Oleh karena itu, checklist ini juga menyediakan standar untuk website yang ramah difabel terutama untuk pemustaka tuna netra atau low vision dengan memperhatikan standar penulisan dan desain lay out nya, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti synthetic speech (Irvill & Nielsen, 2005, hal 15).

Selain checklist tersebut, IFLA juga menerbitkan pedoman layanan perpustakaan untuk difabel yang lebih spesifik berdasarkan jenis disabilitasnya yaitu pedoman layanan untuk penyandang dyslexia dan pedoman untuk tuna rungu. *IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia* diterbitkan pada tahun 2014 yang merupakan edisi revisi dan perluasan dari edisi sebelumnya yaitu edisi tahun 2001. Pedoman ini dikembangkan oleh tim dari *Library Services to*

People with Special Needs (LSN) dan Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD). Pedoman ini ditujukan untuk membantu perpustakaan dalam memberikan layanan untuk pemustaka dyslexia dan pemustaka yang mengalami kesulitan membaca. Guideline ini bisa dijadikan sebagai rujukan bagi semua perpustakaan, dapat digunakan oleh staf perpustakaan untuk menemukan ide, contoh dan saran yang berkaitan dengan cara mengenali pemustaka dyslexia, mendekati pemustaka dyslexia dan bagaimana meningkatkan layanan perpustakaan dengan tepat (IFLA, 2014 hal 9). Selain itu guideline ini menyediakan checklist tips dan ide serta overview best practice dan knowledge base.

Selain guideline untuk pemustaka difabel secara umum, IFLA juga mengeluarkan pedoman layanan perpustakaan untuk jenis-jenis difabel tertentu, misalnya saja untuk tuna rungu dan dyslexia. *Guidelines for Library Services to Deaf People* adalah pedoman penyelenggaraan perpustakaan untuk pemustaka tuna rungu disusun karena kesadaran akan perlunya pedoman layanan untuk tuna rungu yang diawali pada konferensi layanan untuk masyarakat tuna rungu yang diselenggarakan oleh the State Library of New South Wales, Australia pada tahun 1988 dan pedoman resminya diterbitkan pada tahun 1991 oleh IFLA dan bisa diterapkan di berbagai jenis perpustakaan (Day, 2000, hal. 11). Guideline ini mencakup pedoman hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan untuk masyarakat tuna rungu yaitu a) sumber daya manusia yaitu pustakawan professional yang memiiki latar belakang ilmu perpustakaan b) kemampuan komunikasi pustakawan dalam berinteraksi dengan pemustaka tuna rungu baik secara langsung maupun menggunakan teknologi sebagai media pendukung c) koleksi baik koleksi tentang ketulian maupun koleksi untuk tuna rungu seperti film yang dilengkapi dengan bahasa isyarat d) layanan yang mencakup program layanan untuk tuna rungu, menyediakan informasi dan link informasi yang bisa diakses tuna rungu.

Masyarakat disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan mengalami social exclusion, karena memiliki keterbatasan fisik sehingga akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses public. Oleh karena itu, melalui checklist yang

diterbitkan oleh IFLA ini, perpustakaan bisa memberikan layanan untuk masyarakat dengan disabilitas sehingga masyarakat kurang beruntung ini ini akan memiliki kesempatan yang seimbang dengan masyarakat lainnya dalam mengakses layanan public yang dalam hal ini adalah perpustakaan melalui layanan dan koleksi yang disediakan oleh perpustakaan.

c. Pedoman layanan perpustakaan untuk masyarakat multicultural

Pedoman penyelenggaraan layanan perpustakaan untuk masyarakat multicultural ini merupakan hasil kerja melalui proses yang panjang (IFLA 2009) yang melibatkan banyak pihak, dan diprakarsai oleh *Standing Committee of the Section on Library Services to Multicultural Populations.* Penyusunan pedoman ini dimulai pada tahun 1982 dengan terbitnya "Standards for Multicultural Public Library Service standar ini dikembangkan oleh the Working Group on Multicultural Library Services (Victoria) dan the Library Council of Victoria, Australia dan kemudian disempurnakan lagi menjadi menjadi pedoman (guideline) pada tahun 1987. Selanjutnya edisi kedua yang merupakan edisi revisi dari edisi sebelumnya diterbitkan pada tahun 1998 dengan judul "Multicultural Communities: Guidelines for Library Services" edisi terakhir diterbitkan pada tahun 2009 yang merupakan respon terhadap *The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development*' di mana perpustakaan umum memiliki misi untuk melayani berbagai jenis pengguna perpustakaan. Pedoman ini tidak hanya berlaku untuk perpustakaan umum saja tetapi juga semua jenis perpustakaan, sesuai dengan Manifesto IFLA tentang Multicultural Library yang menyatakan bahwa semua jenis perpustakaan seharusnya merefleksikan, mendukung dan mempromosikan keberagaman budaya dan bahasa pada tingkat internasional, nasional dan lokal dan oleh karena itu perpustakaan harus bekerja untuk dialog lintas budaya dan menjadikan warga masyarakat yang aktif (IFLA, 2009).

Pedoman ini mendukung pemerataan dan kesetaraan akses dalam memberikan layanan perpustakaan untuk masyarakat multicultural (IFLA, 2011) karena perpustakaan memberikan layanan kepada beragam minat dan komunitas maka perpustakaan kemudian

berfungsi sebagai pusat untuk pembelajaran, kultural dan informasi. Dalam menghadapi keberagaman kultur dan bahasa, layanan perpustakaan berpegang pada manifesto perpustakaan multicultural dengan memegang teguh komitmen pada prinsip dasar kebebasan dan keseimbangan akses informasi dan pengetahuan untuk semua, dengan menghargai identitas dan nilai-nilai kultural (IFLA Multicultural Library Manifesto, 2008). Pedoman ini juga menjadi dasar perencanaan layanan perpustakaan untuk semua kelompok masyarakat baik dalam menyediakan jenis-jenis koleksi maupun layanan kepada penggunanya yang merepresentasikan semua anggota masyarakat. Prinsip layanan multikultural menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat global memiliki hak terhadap layanan perpustakaan dan informasi di mana perpustakaan harus melayani semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan asal-usul kultur dan bahasanya. Selain itu, dalam pedoman ini juga ditegaskan bahwa dalam memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan, setiap perpustakaan harus mengadopsi kebijakan yang menegaskan komitmen yang jelas untuk inklusi sosial dan kesetaraan service provision (IFLA 2009, hal.9). Inklusi sosial berkaitan dengan semua usaha dan kebijakan untuk menyuarakan kesetaraan dan keseimbangan kesempatan kepada semua orang dari berbagai kondisi dan semua kondisi yang masuk kategori eksklusi sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi social dan kompetisi individu dalam masyarakat (Fourie dalam Lo, 2019, hal 194). Perpustakaan sebagai tempat yang terbuka bagi semua warga masyarakat dari berbagai budaya memberikan kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam berbagai program kegiatan dan akses koleksi secara seimbang merupakan salah satu upaya untuk terlibat dalam inklusi sosial.

d. Pedoman layanan perpustakaan untuk masyarakat lansia yang mengalami dementia

Lansia sering dikaitkan dengan gangguan fisik, salah satunya adalah dementia. Penderita dementia merupakan salah satu masyarakat yang kurang beruntung karena secara perlahan akan kehilangan memori ingatan, personality juga akan mengalami perubahan begitu juga dengan gerak fisik yang terbatas sehingga akan

membutuhkan orang lain dalam kegiatan sehari-hari. Perpustakaan sebagai salah satu fasilitas publik seharusnya bisa menyediakan layanan yang bisa digunakan untuk membantu penderita dementia. Oleh karena itu, IFLA kemudian mengembangkan pedoman layanan untuk penderita dementia.

Tujuan dari pedoman ini adalah meningkatkan kesadaran profesional perpustakaan, care giver, pembuat kebijakan public dan anggota keluarga dan teman-teman yang menderita dementia di lingkungan perpustakaan di mana banyak jenis layanan dan koleksi perpustakaan dapat membantu merangsang memori sambil menyediakan hiburan (Mortesen &Neilsen: 2007, hal 3). Dalam pedoman ini terdapat beberapa panduan penting dalam melayani penderita dementia seperti cara berkomunikasi yang baik dan efektif dengan penderita dementia seperti penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas, sikap dan gesture tubuh yang tenang. Selain itu koleksi perpustakaan untuk membantu dementia juga menjadi unsur penting dalam pedoman ini di mana perpustakaan harus menyediakan koleksi seperti buku berilustrasi, buku tentang sejarah local dan benda-benda (*reminiscence kits)* yang dapat membantu membangkitkan memori penderita dementia. Dan yang terakhir adalah layanan perpustakaan untuk penderita dementia baik layanan antar ke tempat tinggalnya maupun layanan personal ber-jangka panjang yang melibatkan fasilitas perawatan dan pusat-pusat perawatan (day care centers). Dengan memberikan layanan perpustakaan kepada penderita dementia, berarti memberikan kesempatan kepada penderita dementia terlibat dalam kegiatan-kegiatan social sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup mereka.

e. Pedoman layanan perpustakaan untuk masyarakat prisoner

Buku pedoman yang berjudul *Guidelines for library services to prisoners* ini dikembangkan oleh *IFLA's Libraries Serving Disadvantaged Persons* (LSDP) *Section* ini menjadi pedoman untuk mengembangkan layanan khusus untuk masyarakat yang tidak mampu untuk menggunakan layanan perpustakaan secara konvensional, termasuk di sini masyarakat yang sedang dirawat di rumah sakit dan narapidana yang sedang menjalani hukuman di penjara (Lehmann & Locke: 2005,

hal. 3). Penyediaan perpustakaan untuk narapidana merupakan upaya untuk memenuhi hak-hak mereka untuk mendapatkan akses informasi dan juga hak untuk membaca sesuai dengan *The Charter for the Reader* (1994) yang dikembangkan oleh International *Book Committee and the International Publishers Associations* yang diterbitkan oleh UNESCO yang menyatakan bahwa membaca adalah hak universal. Keberadaan perpustakaan di penjara juga akan memberikan kesempatan narapidana untuk menyiapkan mereka dengan kehidupan di luar penjara setelah mereka bebas, dengan melalui koleksi bacaan dan kegiatan perpustakaan yang tersedia. Apalagi masih banyak narapidana yang memiliki pendidikan dan ketrampilan (life skill) yang terbatas sehingga mereka perlu dibekali pengetahuan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup setelah bebas.

Perpustakaan menjadi solusi bagi narapidana untuk mendapatkan pendidikan selama tinggal di penjara karena sesuai dengan *Rule 40 of the United Nations Standard Minimal Rules for the Treatment of Prisoners* (1955) yang menyatakan bahwa setiap institusi seharusnya memiliki perpustakaan yang bisa digunakan oleh semua kategori narapidana, koleksi perpustakaan yang memadai yang mencakup koleksi untuk kebutuhan rekreasi maupun untuk kebutuhan pendidikan dan narapidana didorong untuk menggunakan perpustakaan. Dengan didukung staf perpustakaan yang berkualitas dan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan narapidana maka perpustakaan di penjara akan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pendidikan, hiburan dan program rehabilitasi (Lehmann & Locke: 2005, hal. 5).

Pedoman ini menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan yang dialami oleh masyarakat narapidana dalam memperoleh hak mereka dalam pendidikan melalui bahan bacaan dan kegiatan yang mendukung program rehabilitasi sehingga meskipun tinggal di penjara, mereka tetap bisa menyiapkan diri untuk bisa berpartisipasi dalam masyarakat ketika sudah mendapatkan kebebasan untuk hidup di luar penjara.

2. Implementasi pedoman layanan perpustakan di Perpustakaan: studi kasus di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perpustakaan dituntut untuk dapat memenuhi fungsinya sebagai tempat belajar masyarakat dari berbagai latar belakang dan keadaan social sehingga beberapa pedoman yang sudah diterbitkan oleh IFLA sangat membantu dalam mengembangkan layanan perpustakaan untuk berbagai jenis pemustaka. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah salah satu perpustakaan yang menerapkan standar perpustakaan yang mengakomodir berbagai pemustaka dari berbagai latar belakang. Yang pertama adalah tersedianya layanan perpustakaan untuk pemustaka difabel dan lansia yang terletak di lantai 7. Sesuai dengan ketentuan dalam pedoman layanan perpustakaan untuk difabel bahwa perpustakaan hendaknya memiliki layanan khusus untuk difabel. Untuk mendukung layanan ini, maka perpustakaan harus bisa diakses dengan mudah oleh pemustaka difabel. Bangunan dan desain perpustakaan harus ramah difabel. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Winny Nindya Rekta (2021), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjukkan bahwa gedung perpustakaan sudah lumayan ramah difabel seperti, tersedianya lift menuju ke lantai 7, tersedianya pintu otomatis dan tekstur lantai yang tidak licin sehingga aman untuk pengguna kursi roda dan tuna netra. Toilet untuk difabel juga tersedia dengan desain yang lebih lebar sehingga memungkinkan kursi roda untuk bisa masuk, terutama di lantai 7 dimana lokasi layanan untuk difabel berada. Dari segi koleksi, perpustakaan menyediakan koleksi untuk difabel terutama untuk pemustaka tuna netra dengan disediakannya koleksi huruf braille. Selain itu, juga disediakan alat bantu untuk membaca bagi pemustaka dengan low vision yang memungkinkan untuk memperbesar tulisan melalui layar monitor. Pada layanan untuk difabel ini juga memiliki pustakawan yang siap membantu pemustaka difabel untuk mengakses koleksi dan layanan perpustakaan.

Yang kedua adalah layanan perpustakaan untuk pemustaka lansia yang berada dalam satu ruang dengan layanan untuk difabel. Yang menjadi ciri pokok dari layanan ini adalah jenis koleksi yang tersedia yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia yang

mencakup buku tentang kesehatan, agama dan hobby (missal, cara mengembangkan ikan, budi daya tanaman). Dan untuk mempermudah dalam membaca teks maka perpustakaan menyediakan mesin khusus yang bisa digunakan untuk memperbesar huruf di buku. Fasilitas yang disediakan juga sesuai mendukung kenyamanan lansia seperti kursi santai untuk membaca (kursi dengan sandaran tangan) dan juga ketersediaan kursi roda.

Yang ketiga adalah penerapan perpustakaan berbasis multicultural. Sebagai pusat informasi di level nasional, Perpustakaan Nasional merupakan pusat deposit bagi semua terbitan yang terbit di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan implementasi dari legal deposit, di mana semua penerbit harus menyerahkan setiap terbitannya untuk disimpan di Perpustakaan Nasional sehingga semua koleksi tentang berbagai suku dan kultur di Indonesia baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa local seharusnya akan dimiliki oleh Perpustakaan Nasional sehingga dari segi koleksi, PNRI sudah menerapkan prinsip pedoman layanan untuk masyarakat multicultural. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga mengenalkan beragam budaya yang di Indonesia dengan menyediakan benda-benda yang merupakan ciri khas yang mencerminkan budaya dari masing-masing daerah di Indonesia yang terletak di lantai paling atas (lantai 21).

Selain menerapkan standar layanan sesuai standard dan pedoman yang dikembangkan oleh IFLA, Perpustakaan Nasional juga mengembangkan layanan yang bisa menjangkau masyarakat lebih luas melalui layanan berbasis inklusi sosial. Bahkan selama masa pandemic ini perpustakaan mengembangkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang bertujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi (Perpustakaan Nasional: 2020, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (perpusnas.go.id). Dalam konsep transformasi ini, perpustakaan membuat paradigm baru yaitu 10% untuk me-manage koleksi, 20% untuk me-manage knowledge dan 70% untuk transfer knowledge (Perpustakaan Nasional Republik

Indonesia (perpusnas.go.id). Aspek ketiga inilah yang menjadi dasar pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial karena masyarakat pengguna yang akan menjadi obyek dari transfer knowledge ini di mana perpustakaan bukan hanya sebagai tempat menyimpan koleksi saja tetapi juga sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan, belajar dalam arti yang lebih kontekstual dan sebagai tempat untuk berlatih ketrampilan kerja. Dan pada tahun 2021, program transformasi berbasis inklusi sosial ini sudah menggandeng 450 perpustakaan desa sebagai basis masyarakat marginal di 159 kabupaten dan 32 propinsi (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (perpusnas.go.id).

3. Penerapan program untuk reduced inequality di perpustakaan di beberapa Negara

Berdasarkan asas kebebasan individu yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam akses informasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, perpustakaan menawarkan nilai-nilai inklusif untuk mendukung asas tersebut melalui layanan dan koleksi perpustakaan dengan. Lebih jauh lagi, perpustakaan membantu mengurangi mengurangi ketimpangan (inequality) dengan menyediakan tempat yang aman dan terbuka untuk semua masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan di berbagai belahan dunia. hal ini ditunjukkan dalam *Map of the world* yang dikembangkan oleh IFLA dan merupakan tempat untuk berbagi pengalaman perpustakaan dari berbagai Negara dalam mendukung Sustainable Development Goals. Dalam mendukung tujuan SDGS nomor 10 yaitu reduced inequalities terdapat 13 negara yang berpartisipasi dalam berbagi pengalaman dalam mengembangkan layanan yang mendukung tujuan nomor 10 tersebut (http://librarymap.ifla.org/stories/sdgs/10). Dari benua Afrika, terdapat Negara Tunisa dan Kenya yang berpartisipasi dalam berbagi pengalaman. Perpustakaan di Tunisia mengembangkan layanan *digital skill course* untuk memberikan kesempatan pada para perempuan untuk memiliki keterampilan digital dengan mengembangkan *computer literacy club* yang bertujuan untuk menekan illiteracy yang banyak terjadi pada kelompok perempuan yang dimulai pada tahun 2017. Sedangkan Kenya mendirikan community library di kibera

yang merupakan kerja sama antara Kenya National Library Service (KNLS) yang bekerjasama dengan sebuah NGO, Practical Action dan Berkley Foundation (UK). Perpustakaan ini dikelilingi 25 sekolah dasar, 4 sekolah menengah dan 1 perguruan tinggi. Perpustakaan ini menyediakan akses untuk semua lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang.

Dari Amerika Selatan diwakili Argentina dan Chili. Argentina memiliki program Conectándonos en la Biblio (Connecting in the Library) yang dikembangkan di Santa Clara del Mar Municipal Library yang melibatkan remaja berusia 14 sampai 18 tahun dan kelompok lanjut usia (lansia) berusia 65 tahun ke atas. Pada program ini, para remaja berperan sebagai guru untuk mengajarkan ketrampilan teknologi kepada para lansia. Program yang kedua adalah mendirikan Women's circle sebagai respon terhadap tingginya tingkat kekerasan pada wanita yang terjadi dari tahun 2013-2018 dan bertujuan untuk memperkuat para perempuan dalam menghadapi kekerasan melalui pendidikan hak sipil dan hukum. *Womens circle* menyediakan tempat bagi para perempuan untuk bertemu dengan anggota lain dan mengumpulkan berbagai sumber informasi. Dan program yang ketiga dikembangkan oleh perpustakaan Bebeteca (perpustakaan anak-anak) di kota Buenos Aires yang bertujuan untuk memperkuat keluarga dan anak-anak penyandang disabilitas melalui program *inclusive early childhood development* yang dikembangkan pada tahun 2018. Sedangkan di Chili, perpustakaan mengembangkan program untuk masyarakat tuna wisma yang bernama *BiblioStreet programme*.

Di Asia, Negara China, Singapura, Sri Langka dan Kazakhstan juga membagikan pengalaman mengimplementasikan program untuk reduced inequality. Ada dua program yang ditawarkan oleh perpustakaan di Singapura yaitu kidsREAD, program yang bertujuan untuk memperkuat anak-anak dari keluarga dengan penghasilan rendah melalui ketrampilan Bahasa Inggris. Program yang kedua adalah mengembangkan *satellite digitization centre* yang menyediakan pelatihan dan peluang kerja untuk masyarakat berkebutuhan khusus. Center ini didirikan atas kerjasama antara National Library Board (NLB) bekerjasama dengan Autism Resource Centre (ACR). Di Sri

Langka, implementasi SDGS no 10 ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dengan mengembangkan *skills development programme* yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mengembangkan ketrampilan untuk bekerja. Masa pandemic Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap tingkat pengangguran di Sri Langka. Oleh karena National Library of Sri Lanka (NLSL) mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan reskill dan upskill bagi pencari kerja untuk tenaga kerja yang masih muda untuk menyiapkan memasuki dunia kerja. Pada tahun 2020 NLSL dengan bekerja sama dengan Commonwealth of Learning (COL) membentuk *Coursera Workforce Recovery Initiative* (CWRI) dan memulai program *Skills Online Sri Lanka Programme-Employ for Unemployed* dengan menawarkan beasiswa dan akses ke lebih dari 5000 courses dari berbagai universitas dan institute untuk belajar tentang digital transformation, entrepreneurship, web development, leadership, problem-solving and critical thinking.

Kazakhstan mengembangkan 2 program yang dikembangkan oleh Nazarbayev University yaitu *human library* di mana perpustakaan memberikan tempat yang aman bagi masyarakat yang terdiskriminasi. Kegiatan ini merupakan program pendidikan inklusif yang diadakan pada tahun 2016 di mana perpustakaan mengadakan 5 kegiatan yang melibatkan masyarakat disabilitas, LGBTQ+ dan perempuan muda. Program yang kedua adalah program untuk mempromosikan kesadaran akan kesetaraan gender dengan melalui kegiatan yang diadakan setiap tahun mulai tahun 2017 yaitu "Week of Women" yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pencapaian dalam bidang social dan politik yang diraih oleh perempuan. Sedangkan di China, gerakan reduced inequalities berupa menciptakan *Neighbourhood library* (N-libraries) yaitu perpustakaan umum kecil di rumah-rumah penduduk dengan tujuan untuk mengembangkan budaya membaca dan membuat koleksi dan layanan perpustakaan lebih aksesibel untuk kelompok masyarakat yang rapuh dan menggalakkan neighbourhood communication and community integration.

Dari Amerika Utara, Negara Canada membagikan pengalaman perpustakaan dalam membantu pengungsi. Dengan bekerja sama dengan pemerintah, Perpustakaan umum Toronto mengembangkan layanan untuk masyarakat pengungsi dari Syria yang dilaksanakan dari tahun 2015-2018. Layanan yang disediakan oleh perpustakaan berupa layanan pre-arrival, on-going dan post settlement support services. Salah satu prinsip penting dari program perpustakaan ini adalah untuk menyediakan program outreach dan akses yang bebas hambatan bagi pengungsi baik yang disponsori oleh sector swasta maupun yang didukung oleh pemerintah.

Di benua Eropa, beberapa Negara juga terlibat dalam sharing pengalaman mereka dalam partisipasi dalam SDGs ini yaitu Jerman, Austria, Swedia, dan Rumania. Sebagaimana Canada, Jerman juga lebih focus pada program untuk membantu para pengungsi (refugee) melalui program yang dikembangkan di 2 kota yaitu di Bremen dan Hamburg dengan focus pada pemberian pendidikan bahasa Jerman. Stadbibliothek Bremen mengembangkan project *Future Training Opportunities* (Zukunftschane Ausdildung) pada tahun 2014 dengan target membantu para pengungsi mencapai entry-level qualification (EQ, Einstiegsqualifizierung) dengan membekali kemampuan bahasa dan dukungan social dan pendidikan. Sedangkan program yang dikembangkan di kota Hamburg berupa *dialog for integration* untuk masyarakat pengungsi melalui program yang dikembangkan oleh Perpustakaan Umum Hamburg bekerja sama dengan the Volkshochschule adult education centre untuk mengajarkan bahasa Jerman yang diajarkan melalui volunteer project, *Dialog in Deutsch*. Kegiatan ini dilakukan di 33 perpustakaan yang berhasil membantu pengungsi dan imigran untuk memiliki ketrampilan berbahasa Jerman. Di Swedia, kegiatan ditujukan untuk mengatasi kesenjangan digital (digital gap) pada masyarakat lansia. Pada tahun 2018, Helsingborg Public Library membentuk Digital center untuk meningkatkan kompetensi digital mereka melalui Digital center dengan program training seperti menggunakan komputer, surfing internet dan mengakses layanan public secara online. Rumania juga menekankan pada kegiatan yang berkaitan dengan teknologi digital

dengan mengembangkan program *CODE kids* yaitu program coding skill untuk anak-anak di Rumania yang melibatkan 450 anak-anak. Program ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat digital di masa mendatang, membetuk masyarakat yang kritis dan nantinya juga bisa menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Austria lebih mengembangkan pada program untuk meningkatkan riset tentang SDGs untuk murid SMA karena sebagaimana ditekankan oleh PBB bahwa siswa merupakan unsur penting dalam mencapat tujuan SDGs.

E. Penutup

Perpustakaan, terutama perpustakaan umum memilik peran penting tidak hanya dalam menyediakan berbagai jenis informasi dan layanan perpustakaan tetapi juga dalam memenuhi fungsi sosialnya yaitu sebagai community spaces. Sejak awal, perpustakaan merupakan lembaga yang inklusif yang ditegaskan dalam *Manifesto Public Library* yang dikembangkan oleh UNESCO dan IFLA dengan pernyataan bahwa perpustakaan umum memberikan layanan kepada semua pemustaka tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, jenis kelamin, ras. Dengan fungsi social yang diemban oleh perpustakaan dan nilai-nilai inklusif yang ditawarkan perpustakaan, menjadikan perpustakaan, terutama perpustakaan umum, esensi dari inklusi sebagaimana dinyatakan oleh *Library and Information Commission* (Muddiman, et.al, 2000, hal. 1). Sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial, Perpustakaan umum mempunyai peran penting dalam membuka jalan untuk mengatasi kesenjangan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan terpinggirkan dengan menyediakan berbagai layanan dan akses beragam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pedoman layanan perpustakaan untuk beragam pengguna yang diterbitkan oleh IFLA dan UNESCO juga merupakan wujud dari dukungan terhadap inklusi sosial. Penerapan nilai-nilai inklusif di perpustakaan oleh perpustakaan dari berbagai Negara yang dapat dilihat dalam sharing pengalaman dalam mewujudkan tujuan dari SDGs yang dikembangkan oleh IFLA, menjadi bukti yang kuat bahwa perpustakaan memang esensi dari inklusif itu sendiri

yang kemudian mempromosikan kesetaraan social yang berpotensi menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan yang merupakan salah satu tujuan dari SDGs. Gerakan inklusi sosial yang kemudian diterapkan di banyak perpustakaan juga merupakan gerakan untuk mencapai tujuan SDGS nomor 10 yaitu reduced inequality. Gerakan inklusi sosial merupakan gerakan untuk "melawan" social exclusion yaitu kondisi di mana masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi, social dan kultural (United Nation, 2016 p. 18), di mana masyarakat ini tidak bisa mengakses berbagai sumber-sumber yang dalam kondisi normal tersedia bagi masyarakat lain seperti tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan dan akses kesehatan (Patrick Lo, Minying He & Yan Liu, 2019, hal. 195). Fouri (2007) dalam Patrick Lo (2019, hal. 165), menyatakan bahwa isu social exclusion ini menjadi urgen bagi perpustakaan umum sehingga perlu meninjau ulang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kurang beruntung yang harus menjadi korban social exclusion. Dengan demikian, gerakan melawan social exclusion dengan melalui gerakan social inclusion yang dilakukan oleh perpustakaan adalah sarana untuk mewujudkan masyarakat dengan kesetaraan social dan mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan atau reduced inequality yang merupakan tujuan SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

Balôck, Louise Lutéine Ngo Kobhio (2019). Public libraries and goal 16 of the SDGs in Cameroon: which actors for a national policy? *Global Knowledge, Memory and Communication* Vol. 69 No. 4/5, 2020 pp. 341-362 © Emerald Publishing Limited 2514-9342 DOI 10.1108/GKMC-06-2019-0068

Birgitta Irvall and Gyda Skat Nielsen (2005). Access to libraries for persons with disabilities, the Hagues: IFLA Headquarters. Access to libraries for persons with disabilities - CHECKLIST (ifla.org)

Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonne S. (2009). Handbook of Qualitatif Research. Penerj. Saifuddin Zuhri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fukuda-Parr, S. (2019), "Keeping out extreme inequality from the SDGs agenda - the politics of indicators", Global Policy, Vol. 10, pp. 61-69, doi: 10.1111/1758-5899.12602.

Ghorbani, Shervin (2020). The History of Sustainable Development Goals (SDGs).The History of Sustainable Development Goals (SDGs) (thesustainablemag.com) diakses 30 Desember 2021.

Helle Arendrup Mortensen and Gyda Skat Nielsen (2007). Guidelines for Library Services to Persons with Dementia (IFLA Professional Reports: 104). The Hague, IFLA Headquarters

Henry, Carol. ed. (2001). The Public Library Services: IFLA / UNESCO Guidelines for Development, prepared by a working group chaired by Philip Gill on behalf of the Section of Public Library. Munchen: K.G. Saur.

IFLA (1994). IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994. https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/168/1/pl-manifesto-en.pdf https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/168/1/pl-manifesto-en.pdf Diakses 14 Desember 2016

Ifla (2009). Multicultural Communities: Guidelines for Library Services3rdedition, 2009 (ifla.org) download on desember 2021

IFLA (2011). Multicultural Communities: Guidelines for Library Services An Overview.

IFLA (2014). IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia - Revised and extended. https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/498/1/guidelines-for-library-services-to-persons-with-dyslexia_2014.pdf

IFLA Library Services to People with Special Needs (2017). IFLA Guidelines for Library Services to People Experiencing Homelessnes. https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/768/1/ifla-guidelines-for-library-services-to-people-experiencing-homelessness

Igbinovia, Magnus (2016). "Libraries as Vehicle to Sustainable Developmental Goals (SDGs): Nigerian's current status and outlook." *Library Hi Tech News* Number 5 2016, pp. 16-17, © Emerald Group Publishing Limited, 0741-9058, DOI 10.1108/LHTN-03-2016-0010

John Michael Day (ed.) (2000). *Guidelines for Library Services to Deaf People, 2nd Edition*. The Hague: 2000, IFLA Headquarters.

Kuhn, Heike (2020). "Reducing Inequality Within and Among Countries: Realizing SDGs 10—A Developmental Perspective" dalam *Sustainable Develo-ment Goals and Human Right. Springer Open*/ Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, Heike Kuhn (editor). https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0

Laugesen, Amanda (2014) UNESCO and the Globalization of the Public Library Idea, 1948 to 1965, Library & Information History, 30:1, 1-19, DOI: 10.1179/1758348913Z.00000000052

Mario Coffa (2019). "Libraries motors of change" and the social role of (digital) libraries for their communities, Interview with IFLA President Glòria Pérez-Salmeron. *Digital Library Perspectives* Vol. 35 No. 3/4, 2019 pp. 142-145 © Emerald Publishing Limited 2059-5816 DOI 10.1108/DLP-07-2019-0029

Muddiman, Dave et.al. (2000). *Open to All? The Public Library and Social Exclusion. Volume One: Overview and Conclusions*. The Council for Museums, Archives and Libraries. Open to All? The Public Library and Social Exclusion (rclis.org)

Neil M. Dawson (2018) Leaving no-one behind? Social inequalities and contrasting development impacts in rural Rwanda, Development Studies Research, 5:1, 1-14, DOI: 10.1080/21665095.2018.1441039

Patrick Lo, Minying He, Yan Liu (2019). Social inclusion and social capital of the Shanghai Library as a community place for self-improvement. *Library Hi Tech* Vol. 37 No. 2, 2019 pp. 193-214 © Emerald Publishing Limited 0737-8831 DOI 10.1108/LHT-04-2018-0056

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2020). Webinar Budaya Literasi: raih literasi melalui Transformasi perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (perpusnas.go.id). Diakses 16 Februari 2022.

Rekta, Winny Nindya (2021). Evaluasi Layanan Perpustakaan untuk Pemustaka Berkebutuhan Khusus berdasarkan Standar IFLA Checklist di Perpustakaan Nasional.

SDGs Indonesia. Apa itu SDGs. Apa itu SDGs (SDGs2030indonesia.org), diunduh pada 1 Januari 2022.

UNESCAP (2019). A Guide to Inequality and the SDGs (unescap.org), download on 17 JAnuari 2022).

United Nations (2015), Inequality and the 2030 Agenda for Sustainable Development Development Issues No. 4, United Nations, New York, available at: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_dev_issues/dsp_policy_04.pdf.

United Nations (2016). Leaving no one behind: the imperative of inclusive development (Report on the World Social Situation 2016). New York: Department of Economic and Social Affairs. full-report.pdf (un.org).

Vibeke Lehmann and Joanne Locke (2005). Guidelines for library services to prisoners (3d Edition): (IFLA Professional Reports: 92) Revised version of IFLA Professional Report 46. The Hague: IFLA Headquarters.

Yap, Joseph Marmol dan Kamilova, Yelizaveta (2019). Toward becoming an inclusive: Integrating Sustainable Development Goal 5 in the library agenda. *Library Management* Vol. 41 No. 2/3, 2020 pp. 53-66 © Emerald Publishing Limited 0143-5124 DOI 10.1108/LM-08-2019-005. LM-08-2019-0057_proof 53.66 (uin-suka.ac.id).